Journal of Indonesian Society Empowerment (JISE)
P-ISSN: 2987-8160 | E-ISSN: 2987-7288
Vol 4 No 2 (2026) | Page 142 - 155
DOI. https://doi.org/10.61105/jise.v4i2.603

Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM melalui Peningkatan Literasi, Penguatan Ekonomi Lokal, dan Tata Kelola Administrasi

Fidhia Aruni[1], Yosie Gabriela Panjaitan[2], Rabiatul Adawiyah[1], Nurul Mizna Sukma[3], Khairunnisa[4], Rico Dwi Cahyo[3], Siti Maisyarah[2], Rudi Kurniawan[1], Muhaddis[1], Nurmasyahyati[2], Ana Zahara[5]

[1] Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Senior Medan, Indonesia
[2] Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Senior Medan, Indonesia
[3] Program Studi Akuntansi, Universitas Senior Medan, Indonesia
[4] Program Studi PGSD, Universitas Senior Medan, Indonesia
[5] Program Studi Administrasi Publik, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Indonesia

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), anak-anak, serta aparatur gampong di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, melalui empat program terpadu: literasi keuangan, penguatan ekonomi lokal, pendidikan literasi anak, dan peningkatan tata kelola administrasi. Kegiatan memakai pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang terdiri atas asesmen kebutuhan, focus group discussion, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi dengan instrumen pretest-posttest, lembar observasi, serta wawancara. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman keuangan pelaku UMKM dari 46,3 menjadi 82,1, skor literasi anak dari 38,5 menjadi 71,4, dan skor kompetensi administrasi aparatur gampong dari 41,8 menjadi 79,5. Pelaku UMKM yang mencatat keuangan usaha secara rutin meningkat dari 31,4% menjadi 82,9%. Taman baca gampong dan sistem pengarsipan yang lebih tertib juga terbentuk sebagai luaran program. Pelibatan mitra sejak perencanaan, materi kontekstual, dan pendampingan berulang menyertai perubahan kapasitas tersebut. Temuan menunjukkan perubahan awal pada kelompok peserta selama program. Tanpa kelompok pembanding, hasil ini belum membuktikan keunggulan program terpadu atas intervensi tunggal. Adaptasi program di wilayah lain memerlukan asesmen kebutuhan setempat.

Keywords:
community empowerment; financial literacy; local economic development; children's literacy; village governance

Correspondence Author:
Fidhia Aruni
fyfie53@gmail.com

Article History
Submitted; 8 October 2026
Revised; 28 October 2026
Accepted; 4 November 2026
Published; 5 November 2026

Empowering Communities and MSMEs through Enhancing Literacy, Strengthening Local Economies, and Improving Administrative Governance

Abstract

This community service project aimed to enhance the capacity of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), children, and village (gampong) officials in Lhoksukon District, North Aceh Regency, through four integrated programs: financial literacy, local economic strengthening, children's literacy education, and administrative governance enhancement. Using a Participatory Action Research (PAR) approach, the project comprised a needs assessment, focus group discussions, training, mentoring, and evaluation using pretest-posttest instruments, observation sheets, and interviews. Results showed an increase in average scores: MSME financial understanding rose from 46.3 to 82.1, children's literacy from 38.5 to 71.4, and village officials' administrative competency from 41.8 to 79.5. The proportion of MSMEs routinely keeping business financial records increased from 31.4% to 82.9%. Key outputs also included the establishment of a village reading corner (taman baca gampong) and a more structured archiving system. Early partner involvement from the

Published by
Yayasan Lentera Avanya Nagari *in collaboration with* Universitas Tribhuwana Tunggadewi

This article is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike **(CC BY-SA)**

planning phase, contextualized materials, and repeated mentoring accompanied these capacity improvements. Findings reflect initial changes within the participant group over the course of the project. Without a control group, these results do not prove the superiority of an integrated program over single interventions. Program adaptation in other regions requires localized needs assessments.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses penguatan kendali individu dan kelompok atas sumber daya serta keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Perkins & Zimmerman, 1995). Dalam pembangunan, proses ini mencakup penguatan kapasitas, kepercayaan diri, dan akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, serta layanan publik (Narayan, 2002). Pada komunitas perdesaan dan semiperkotaan, kebutuhan tersebut perlu dijabarkan melalui masalah dan kemampuan awal mitra. Pendekatan ini menjadi dasar untuk mengaitkan pengelolaan usaha, dukungan literasi anak, dan administrasi gampong dalam kegiatan pendampingan yang sesuai konteks lokal.

Mitra kegiatan di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, terdiri atas pelaku usaha pengolahan pangan dan kerajinan, anak usia sekolah dasar di sekitar taman baca, serta aparatur yang menangani administrasi dan pelayanan warga. Observasi awal dan diskusi dengan perangkat gampong, pelaku usaha, guru, serta orang tua memperlihatkan empat kebutuhan: pembiasaan pencatatan dan pemisahan uang usaha, perbaikan kemasan serta pemasaran produk, penyediaan bahan bacaan di luar sekolah, dan penyeragaman pencatatan surat serta pengarsipan. Profil kebutuhan tersebut menjadi dasar penyusunan intervensi menurut kapasitas awal setiap kelompok, bukan semata-mata berdasarkan gambaran persoalan nasional.

Asesmen awal pada kelompok peserta mencakup 91 penerima manfaat langsung, yaitu 35 pelaku UMKM, 42 anak berusia 7–12 tahun, dan 14 aparatur gampong. Pada kelompok UMKM, 24 orang (68,6%) belum mencatat keuangan secara rutin, 26 orang (74,3%) belum memisahkan uang pribadi dan uang usaha, serta 29 orang (82,9%) belum menggunakan pemasaran digital. Skor awal pemahaman keuangan sebesar 46,3 dari 100 menunjukkan kebutuhan penguatan pengetahuan. Pada kelompok anak, skor literasi awal sebesar 38,5 dan hanya 8 dari 42 anak (19,0%) menunjukkan minat baca tinggi. Pada kelompok aparatur, skor kompetensi awal sebesar 41,8 dan rata-rata keterpenuhan indikator ketertiban administrasi sebesar 3,4 dari 10. Angka tersebut berasal dari asesmen mitra pada minggu pertama dan tidak dimaksudkan sebagai gambaran seluruh penduduk Kecamatan Lhoksukon.

Sebanyak 35 pelaku UMKM tergabung dalam tiga kelompok usaha di enam gampong, dengan produk berupa kue kering, keripik, anyaman, dan makanan olahan. Sebanyak 42 anak tinggal di sekitar lokasi taman baca, sedangkan 14 aparatur berasal dari lima gampong. Solusi yang diberikan mencakup buku kas sederhana dan latihan pemisahan uang usaha, praktik pengemasan dan pemasaran digital, penyediaan ruang taman baca beserta 120 buku, serta paket templat agenda surat, daftar arsip, dan register layanan. Nama gampong dan sebaran peserta per gampong perlu dilengkapi dari daftar mitra agar profil lokasi dapat ditelusuri secara empiris.

Data awal mitra memperlihatkan bahwa prioritas kegiatan terletak pada kemampuan menggunakan pengetahuan dalam keputusan sehari-hari. Pada pelaku UMKM, kelemahan

pencatatan membatasi dasar penetapan harga dan penilaian laba. Literatur menghubungkan literasi keuangan dengan perencanaan serta pengelolaan risiko keuangan (Lusardi & Mitchell, 2014; Lusardi & Tufano, 2015). Oleh karena itu, intervensi diarahkan pada latihan memakai transaksi usaha peserta sendiri, disertai pengenalan layanan keuangan dan risiko pembiayaan. Data nasional hanya menjadi konteks pendukung dan tidak menggantikan asesmen kebutuhan kelompok sasaran.

UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai penyerap tenaga kerja terbesar dan penopang ekonomi lokal (Tambunan, 2019). Secara global, usaha kecil dan menengah berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi pertumbuhannya dibatasi oleh akses pembiayaan dan kapasitas manajerial (Ayyagari et al., 2007). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menegaskan kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk menumbuhkan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha. Hasil tinjauan sistematis dan meta-analisis menunjukkan bahwa pendidikan keuangan dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku keuangan, terutama bila materinya spesifik, kontekstual, dan diberikan tepat waktu (Fernandes et al., 2014; Kaiser & Menkhoff, 2017). Karena itu, pelatihan yang bersifat satu arah dan umum kurang tepat; pendekatan partisipatif dengan contoh dari kegiatan usaha peserta sendiri lebih menjanjikan.

Dari sisi pendidikan, kebiasaan membaca pada usia dini berkaitan erat dengan perkembangan kosakata, pemahaman bacaan, dan prestasi belajar jangka panjang (Cunningham & Stanovich, 1997; Mol & Bus, 2011). Keterlibatan orang tua dan lingkungan sekitar turut menentukan keberhasilan anak mengembangkan keterampilan membaca (Sénéchal & LeFevre, 2002). Pemerintah telah mendorong penumbuhan budaya literasi melalui Gerakan Literasi Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015, tetapi gerakan itu perlu diperluas ke ruang-ruang komunitas agar anak terpapar bahan bacaan tidak hanya di sekolah.

Dari sisi kelembagaan, tata kelola yang baik menuntut organisasi publik yang tertib, transparan, dan akuntabel, dimulai dari kemampuan administratif yang paling dasar (Weiss, 2000). Tata kelola modern juga menekankan jejaring dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain (Rhodes, 1996; Ansell & Gash, 2008). Pada tingkat gampong, administrasi yang rapi menjadi prasyarat pelayanan publik yang cepat, perencanaan pembangunan yang akurat, dan pengelolaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam identifikasi masalah dan pelaksanaan tindakan (Chambers, 1994; Cornwall & Jewkes, 1995). Pengalaman praktik juga menjadi dasar penguatan keyakinan atas kemampuan diri (Bandura, 1977). Pada mitra kegiatan ini, kesenjangan yang hendak ditangani ialah belum terhubungnya pembiasaan pengelolaan usaha, dukungan literasi anak, dan perangkat administrasi komunitas dalam satu rangkaian pendampingan. Literatur yang dirujuk membahas pendidikan keuangan, literasi anak, dan tata kelola melalui fokus yang berbeda. Naskah ini belum menyediakan telaah sistematis program pengabdian sejenis sehingga kebaruan tidak dimaknai sebagai klaim bahwa integrasi tersebut belum pernah dilakukan.

Nilai tambah program terletak pada keterkaitan operasional empat bidang dalam satu kerangka PAR. Literasi keuangan mendasari pencatatan dan perhitungan biaya untuk mendukung penetapan harga serta pemasaran produk. Keterampilan pencatatan juga

digunakan oleh pelaku UMKM untuk membantu pengelolaan dana operasional taman baca. Pada sisi kelembagaan, aparatur mendukung penerbitan surat keputusan pengelola taman baca dan pencatatan kegiatan kelompok usaha. Dengan demikian, kontribusi program berupa pengaitan keterampilan usaha dengan pengelolaan layanan komunitas dan administrasi gampong, yang dievaluasi pada tingkat perubahan awal masing-masing kelompok.

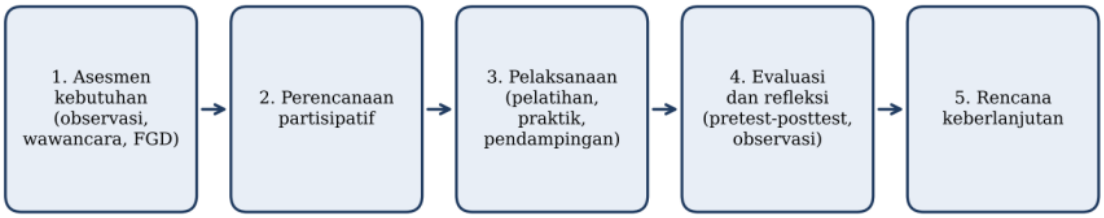
Prioritas intervensi disusun menurut kebutuhan setiap kelompok. Buku kas dan latihan pemisahan uang menjadi landasan pengelolaan usaha sebelum pengembangan pemasaran. Penyediaan taman baca dan kegiatan membaca bersama menjawab keterbatasan akses bacaan anak. Paket agenda, format surat, register, dan daftar arsip mendukung penertiban administrasi. Dalam kerangka pemberdayaan dan tata kelola kolaboratif, solusi tersebut menghubungkan kapasitas individu dengan dukungan kelembagaan mitra (Narayan, 2002; Ansell & Gash, 2008). Program secara substantif mendukung target SDGs 4.1 tentang hasil belajar, 8.3 tentang pengembangan dan formalisasi usaha, serta 16.6 tentang kelembagaan yang efektif dan akuntabel (United Nations, 2015). Skor literasi, adopsi pencatatan, dan ketertiban arsip merupakan ukuran program yang relevan dengan arah target tersebut, tetapi tidak setara dengan pengukuran indikator SDGs resmi.

Kegiatan ini bertujuan (1) meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM, (2) memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk, (3) menumbuhkan minat dan kemampuan literasi anak melalui taman baca dan kegiatan membaca yang menyenangkan, serta (4) meningkatkan kualitas tata kelola administrasi di tingkat gampong. Luaran yang ditargetkan berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra, perubahan perilaku pencatatan keuangan, tersedianya taman baca, perangkat administrasi yang baku, dan artikel ilmiah sebagai bentuk diseminasi.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan mitra dalam identifikasi masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan, dan refleksi. Kegiatan berlangsung selama delapan minggu pada Juli–Agustus 2026 di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Peserta terdiri atas 35 pelaku UMKM dari tiga kelompok usaha di enam gampong [lengkapi enam nama gampong sesuai daftar peserta], 42 anak berusia 7–12 tahun di sekitar taman baca [lengkapi nama gampong lokasi taman baca], serta 14 aparatur dari lima gampong [lengkapi lima nama gampong sesuai daftar peserta]. Jumlah tersebut merujuk pada peserta kegiatan, bukan populasi seluruh kecamatan; distribusi dan kemungkinan tumpang tindih lokasi antarkelompok perlu diverifikasi dari daftar mitra.

Tahapan kegiatan disajikan pada Gambar 1 dan dirinci pada Tabel 1. Tahap pertama adalah asesmen kebutuhan melalui observasi lapangan, wawancara terstruktur, dan focus group discussion (FGD) dengan perangkat gampong, kelompok UMKM, guru, dan orang tua. Tahap kedua adalah perencanaan partisipatif untuk menyepakati prioritas, jadwal, materi, dan pembagian peran. Tahap ketiga adalah pelaksanaan empat program berupa pelatihan, simulasi, praktik langsung, dan pendampingan. Tahap keempat adalah evaluasi dan refleksi bersama, dan tahap kelima adalah perencanaan keberlanjutan.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian (Sumber: Dokumentasi Penulis)
Sumber: Dokumentasi Penulis

Frekuensi di atas bersumber dari uraian pelaksanaan dalam naskah. Jumlah jam tiap sesi dan rincian jadwal pelatihan pemasaran belum tersedia sehingga belum dapat dilaporkan. Pengukuran akhir dilakukan pada minggu ketujuh; hasilnya menggambarkan kondisi akhir pendampingan dan belum menunjukkan pemeliharaan praktik setelah program berakhir. Untuk melihat bagaimana rincian intervensi per kelompok sasaran, disajikan dalam tabel 2.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahap	Kegiatan	Mitra	Waktu
Asesmen kebutuhan	Observasi, wawancara, dan FGD	Perangkat gampong, UMKM, guru, orang tua	Minggu 1
Perencanaan partisipatif	Prioritas, jadwal, materi, dan peran	Seluruh kelompok mitra	Minggu 2
Pelaksanaan	Pelatihan, taman baca, dan pendampingan	35 UMKM, 42 anak, 14 aparatur	Minggu 3–6
Evaluasi dan refleksi	Posttest, observasi, kepuasan, FGD	Seluruh kelompok mitra	Minggu 7
Keberlanjutan	Tindak lanjut dan serah terima	Kepala gampong, pengelola, ketua kelompok	Minggu 8

Sumber: Data dari penulis

Evaluasi menggunakan kombinasi instrumen kuantitatif dan kualitatif. Pengetahuan peserta diukur dengan tes tertulis sebelum dan sesudah kegiatan (pretest dan posttest) berskala 0–100: 20 soal pilihan ganda untuk pelaku UMKM dan aparatur, serta 15 butir tugas membaca dan memahami cerita untuk anak. Perubahan perilaku diamati dengan lembar observasi, seperti kepemilikan buku catatan keuangan, pemisahan uang usaha, penggunaan media pemasaran digital, kelengkapan buku register, dan ketertiban arsip. Pengalaman dan persepsi mitra digali melalui wawancara dan FGD akhir. Peningkatan skor dianalisis secara deskriptif dengan menghitung selisih rerata dan normalized gain (N-gain) dengan kriteria rendah (<0,3), sedang (0,3–0,7), dan tinggi (>0,7).

N-gain dihitung secara deskriptif dari rerata kelompok dengan rumus g = (rerata posttest − rerata pretest) / (100 − rerata pretest). Nilai tersebut bukan rerata N-gain individu dan tidak digunakan sebagai uji signifikansi. Indikator tiap kelompok dibaca menurut instrumen masing-masing.

Tabel 2. Rincian intervensi per kelompok sasaran

Bidang dan sasaran	Materi serta aktivitas	Frekuensi dan waktu
Literasi keuangan 35 UMKM	Pemisahan uang, buku kas, biaya produksi, harga jual, layanan keuangan, dan risiko pinjaman; praktik memakai data usaha peserta.	Empat pertemuan; tahap pelaksanaan minggu 3–6.
Ekonomi lokal 35 UMKM	Pengemasan, label, legalitas dasar, foto dan deskripsi produk, pemasaran digital; fasilitasi pembelian bahan baku serta pemasaran kolektif.	Pada tahap pelaksanaan minggu 3–6; jumlah dan durasi sesi belum tersedia.
Literasi 42 anak usia 7–12 tahun	Taman baca dengan 120 buku; membaca nyaring, permainan kata, menggambar cerita, dan menceritakan kembali; pengelompokan menurut kemampuan.	Tiga kali seminggu; orang tua dilibatkan dalam dua pertemuan. Durasi tiap pertemuan belum tersedia.
Administrasi 14 aparatur	Agenda surat, penomoran dan format surat, disposisi, daftar arsip, register layanan; pengelompokan dan pemindaian dokumen.	Dua sesi teori dan tiga sesi praktik; tahap pelaksanaan minggu 3–6.

Sumber: Data dari penulis

HASIL DAN DISKUSI

Kondisi Awal Mitra dan Hasil Asesmen Kebutuhan

Asesmen kebutuhan pada minggu pertama menegaskan temuan observasi awal. Dari 35 pelaku UMKM, hanya 11 orang (31,4%) yang mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha secara rutin, 9 orang (25,7%) yang memisahkan uang pribadi dari uang usaha, dan 6 orang (17,1%) yang memanfaatkan media sosial atau pasar daring untuk memasarkan produk. Sebagian besar peserta menyatakan menentukan harga jual berdasarkan kebiasaan atau harga pesaing, tanpa menghitung biaya produksi. Beberapa peserta juga bergantung pada pinjaman informal berbunga tinggi ketika membutuhkan modal tambahan, dan hanya sedikit yang memahami skema pembiayaan formal.

Pada kelompok anak, hasil pretest memperlihatkan skor rata-rata literasi 38,5. Anak-anak umumnya mampu mengenali huruf dan membaca kata sederhana, tetapi mengalami kesulitan memahami isi bacaan dan menceritakan kembali. Wawancara dengan orang tua mengungkapkan bahwa rumah tangga hanya memiliki sedikit buku selain buku pelajaran, dan hanya 8 dari 42 anak (19,0%) yang menunjukkan minat membaca tinggi menurut pengamatan fasilitator. Pada kelompok aparatur, skor rata-rata pretest administrasi adalah 41,8 dan hasil observasi dokumen menunjukkan bahwa rata-rata hanya 3,4 dari 10 indikator ketertiban

administrasi yang terpenuhi, misalnya buku agenda surat masuk dan keluar, penomoran surat, arsip penduduk, dan pencatatan layanan.

Program Literasi Keuangan dan Penguatan Ekonomi Lokal

Pelatihan literasi keuangan dilaksanakan dalam empat pertemuan dengan materi pengelolaan uang usaha, pencatatan sederhana, perhitungan harga pokok produksi, penetapan harga jual, pengenalan layanan keuangan formal, serta bahaya pinjaman ilegal dan investasi bodong. Fasilitator memakai contoh dari produk peserta sendiri, misalnya kue kering, keripik, anyaman, dan makanan olahan, sehingga setiap peserta menghitung biaya usahanya secara nyata. Buku catatan sederhana dibagikan dan peserta berlatih mengisinya selama pelatihan. Pendekatan ini dipilih karena bukti menunjukkan bahwa pendidikan keuangan lebih efektif bila dikaitkan dengan keputusan yang sedang dihadapi peserta (Fernandes et al., 2014; Kaiser & Menkhoff, 2017).

Untuk penguatan ekonomi lokal, tim menyelenggarakan pelatihan pengemasan produk, pembuatan label, pengurusan legalitas dasar seperti nomor induk berusaha, dan pemasaran digital melalui aplikasi pesan, media sosial, dan pasar daring. Tim juga memfasilitasi pertemuan antarpelaku usaha untuk membahas kemungkinan pembelian bahan baku secara bersama dan pemasaran kolektif. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi saat praktik memotret produk dan menulis deskripsi dagangan. Salah satu peserta menyampaikan bahwa selama ini ia tidak pernah tahu apakah usahanya untung atau rugi, dan baru menyadari selisih antara omzet dan laba setelah menghitung bersama fasilitator.

Perubahan yang terjadi pada kelompok UMKM disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata skor pemahaman keuangan naik dari 46,3 menjadi 82,1 dengan N-gain 0,67 yang termasuk kategori sedang mendekati tinggi. Pelaku usaha yang mencatat keuangan secara rutin meningkat dari 11 menjadi 29 orang, yang memisahkan uang pribadi dan uang usaha dari 9 menjadi 27 orang, dan yang memanfaatkan pemasaran digital dari 6 menjadi 22 orang. Peningkatan terbesar tampak pada kebiasaan mencatat, yang memang menjadi fokus praktik berulang selama pendampingan.

Tabel 3. Perubahan Pengetahuan dan Perilaku Pelaku UMKM Sebelum dan Sesudah Kegiatan, n = 35

Indikator	Sebelum	Sesudah
Skor pemahaman keuangan	46,3	82,1
Pencatatan rutin	11 (31,4%)	29 (82,9%)
Pemisahan uang pribadi dan usaha	9 (25,7%)	27 (77,1%)
Pemasaran digital	6 (17,1%)	22 (62,9%)

Sumber: Data dari penulis

Hasil penguatan ekonomi lokal terutama tampak pada perubahan praktik usaha. Tiga kelompok menyepakati harga acuan produk sejenis, dua kelompok mulai membeli bahan baku secara kolektif, dan sebagian produk menggunakan kemasan serta label baru. Namun, kedua naskah belum memuat jumlah UMKM yang telah memperoleh NIB, jumlah produk yang benar-benar berganti kemasan, maupun pencatatan omzet dan volume penjualan sebelum serta sesudah kegiatan. Pelatihan legalitas karena itu belum dapat dilaporkan sebagai keberhasilan

penerbitan NIB, sedangkan perbaikan kemasan belum dapat dinyatakan sebagai kenaikan penjualan. Capaian yang dapat ditelusuri ialah adopsi pencatatan dan pemasaran digital pada Tabel 3 serta pembelian bersama oleh dua kelompok; dampak ekonomi memerlukan verifikasi lanjutan berdasarkan dokumen usaha.

Peningkatan tersebut sejalan dengan temuan Lusardi dan Mitchell (2014) bahwa pengetahuan keuangan dasar, seperti perhitungan sederhana, bunga, dan risiko, merupakan fondasi bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Perubahan perilaku yang cukup besar dalam waktu singkat dimungkinkan oleh tiga faktor. Pertama, materi dibuat konkret dengan memakai data usaha peserta sehingga manfaatnya terasa langsung. Kedua, praktik dilakukan berulang dan didampingi, yang memberi pengalaman keberhasilan kecil dan menumbuhkan keyakinan diri (Bandura, 1977). Ketiga, kelompok usaha menjadi ruang saling belajar sehingga peserta yang lebih cepat paham membantu yang lain. Meski demikian, pemasaran digital masih menjadi aspek yang paling sulit dipertahankan; hanya 22 dari 35 peserta yang aktif, dan sebagian terkendala kualitas jaringan internet dan kepercayaan diri dalam menulis promosi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi lokal memerlukan pendampingan lebih panjang daripada pelatihan satu kali. Gambar 2 di bawah ini adalah suasana ketika sosialisasi dan diskusi program UMKM berjalan.



Gambar 2. Sosialisasi dan diskusi program UMKM bersama masyarakat
Sumber: Dokumentasi Penulis

Program Pendidikan Literasi Anak

Program literasi anak dilaksanakan melalui pendirian taman baca yang memanfaatkan satu ruang milik gampong dengan koleksi awal 120 buku cerita bergambar, buku pengetahuan populer, dan buku cerita rakyat Aceh yang dikumpulkan dari donasi. Kegiatan berlangsung tiga kali seminggu dan berisi membaca nyaring, bercerita, permainan kata, menggambar cerita, dan kegiatan menceritakan kembali. Gambar 3 adalah sesi sosialiasi dan diskusi dalam kegiatan tersebut. Orang tua diajak hadir pada dua pertemuan untuk mempelajari cara membacakan buku dan menciptakan kebiasaan membaca di rumah. Penyusunan jadwal piket pengelola taman baca melibatkan remaja gampong dan ibu-ibu agar kegiatan tidak bergantung pada tim pengabdi.

Hasil posttest menunjukkan skor rata-rata literasi anak meningkat dari 38,5 menjadi 71,4 dengan N-gain 0,53 (kategori sedang). Jumlah anak dengan minat baca tinggi menurut lembar observasi meningkat dari 8 anak (19,0%) menjadi 30 anak (71,4%). Dalam kegiatan menceritakan kembali, anak mulai mampu menyebutkan tokoh, tempat, dan urutan peristiwa dengan runtut. Beberapa orang tua melaporkan bahwa anak mereka meminta dibacakan buku sebelum tidur dan meminjam buku untuk dibawa pulang. Temuan ini mendukung hasil penelitian bahwa paparan terhadap bahan cetak dan keterlibatan orang tua berkontribusi pada kemampuan membaca dan kosakata anak (Mol & Bus, 2011; Sénéchal & LeFevre, 2002).

Keberhasilan ini tidak terlepas dari pilihan bahan bacaan yang dekat dengan kehidupan anak, termasuk cerita rakyat Aceh yang dikenal dalam lingkungan keluarga, serta suasana kegiatan yang menyenangkan dan tidak menyerupai pelajaran di kelas. Kendala yang ditemui adalah variasi kemampuan dasar yang cukup lebar; sebagian anak telah lancar membaca, sementara yang lain masih mengeja. Fasilitator mengatasinya dengan membagi kelompok berdasarkan kemampuan dan menugaskan anak yang lebih mahir sebagai teman membaca. Keterbatasan jumlah buku juga tetap menjadi tantangan, sehingga penggalangan donasi buku perlu dilakukan terus-menerus.



Gambar 3. Kegiatan sosialisasi dan diskusi program literasi anak
Sumber: Dokumentasi Penulis

Program Peningkatan Tata Kelola Administrasi

Program tata kelola administrasi berfokus pada empat hal: pencatatan surat masuk dan keluar, penomoran dan format surat yang baku, pengarsipan dokumen, dan pencatatan layanan kepada warga. Pelatihan diselenggarakan dalam dua sesi teori dan tiga sesi praktik di kantor gampong seperti terlihat dalam gambar 4. Tim menyusun paket templat sederhana yang terdiri atas buku agenda, format surat keterangan, lembar disposisi, daftar arsip, dan buku register layanan. Peserta kemudian memindahkan dokumen yang ada ke dalam sistem arsip baru berdasarkan kategori dan tahun, lalu memindai dokumen penting agar tersimpan sebagai salinan digital.

Hasil evaluasi menunjukkan skor rata-rata kompetensi administrasi aparatur meningkat dari 41,8 menjadi 79,5 dengan N-gain 0,65 (kategori sedang). Jumlah indikator ketertiban

administrasi yang terpenuhi naik dari rata-rata 3,4 menjadi 7,8 dari 10 indikator. Perubahan paling terlihat pada penomoran surat, pengisian buku agenda, dan penataan arsip, sedangkan pemanfaatan arsip digital masih berkembang bertahap karena tidak semua kantor gampong memiliki perangkat komputer yang memadai. Aparatur melaporkan pencarian dokumen dan pelayanan yang lebih cepat. Namun, waktu pencarian dan durasi pelayanan belum diukur, sehingga laporan tersebut merupakan persepsi peserta, bukan bukti kuantitatif efisiensi layanan.

Hasil tersebut memperkuat pandangan bahwa tata kelola yang baik bermula dari praktik administrasi dasar yang konsisten, sebelum dapat berkembang menjadi akuntabilitas dan transparansi yang lebih luas (Weiss, 2000). Pelibatan beberapa gampong dalam satu pelatihan juga menciptakan jejaring belajar antaraparatur. Mereka saling bertukar format dan pengalaman, yang sejalan dengan gagasan tata kelola kolaboratif bahwa pembelajaran lintas pihak memperkuat kapasitas lembaga (Ansell & Gash, 2008; Rhodes, 1996). Tantangan yang masih ada adalah pergantian personel yang dapat memutus pengetahuan, sehingga perlu dibuat panduan tertulis yang dapat diwariskan kepada pejabat berikutnya.



Gambar 4. Kegiatan diskusi program administrasi gampong
Sumber: Dokumentasi Penulis

Rekapitulasi Capaian dan Dinamika Pelaksanaan

Rekapitulasi capaian ketiga kelompok mitra dan penerapannya disajikan pada Tabel 4 dan tabel 5. Seluruh kelompok menunjukkan peningkatan skor, dengan N-gain pada kategori sedang sebesar 0,53–0,67. Pola ini memperlihatkan perubahan awal selama pendampingan. Perbedaan N-gain antarkelompok tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai perbedaan efektivitas karena setiap kelompok menggunakan instrumen, materi, dan karakteristik peserta yang berbeda. Desain tanpa kelompok pembanding juga belum dapat memisahkan pengaruh program dari faktor lain.

Tabel 4. Rekapitulasi Capaian Skor Kelompok Mitra

Kelompok	n	Pretest	Posttest	N-gain	Kategori
UMKM	35	46,3	82,1	0,67	Sedang

Anak 7–12 tahun	42	38,5	71,4	0,53	Sedang
Aparatur	14	41,8	79,5	0,65	Sedang

Tabel 5. Bukti penerapan praktik dan luaran program

Indikator	Awal	Akhir atau luaran tercatat
Pencatatan rutin UMKM	11 dari 35	29 dari 35; bertambah 18 orang
Pemasaran digital UMKM	6 dari 35	22 dari 35; bertambah 16 orang
Pembelian bahan baku bersama	Tidak dilaporkan	Dua dari tiga kelompok mulai menerapkan
Minat baca tinggi	8 dari 42 anak	30 dari 42 anak; bertambah 22 anak
Sarana dan aktivitas taman baca	Akses bacaan terbatas secara kualitatif	120 buku awal; kegiatan tiga kali seminggu; dua pertemuan orang tua
Ketertiban administrasi	Rata-rata 3,4 dari 10 indikator	Rata-rata 7,8 dari 10 indikator; bertambah 4,4 indikator

Data tersebut memperlihatkan perubahan praktik yang tercatat selama pendampingan. Frekuensi kegiatan taman baca merupakan informasi pelaksanaan, bukan angka kehadiran aktual. Naskah belum menyediakan jumlah kunjungan, frekuensi peminjaman buku, perubahan omzet, jumlah dokumen yang diproses memakai templat, atau jumlah gampong yang konsisten menggunakan register. Karena itu, perkembangan pemasaran diukur melalui adopsi media digital dan pembelian bersama, sedangkan penggunaan perangkat administrasi didukung oleh perubahan indikator ketertiban dan uraian praktik. Hasil ini belum cukup untuk menyimpulkan kenaikan penjualan, intensitas penggunaan taman baca, atau efisiensi layanan secara kuantitatif.

Dinamika pelaksanaan memperlihatkan pentingnya penyesuaian jadwal dengan ritme kerja mitra dan pelibatan tokoh gampong. Pelaku UMKM yang memahami pencatatan membantu pengelolaan dana operasional taman baca, sementara aparatur mendukung penyusunan dokumen pengelola dan pencatatan kegiatan kelompok usaha. Keterkaitan ini menunjukkan dukungan antarkelompok selama pendampingan, tetapi belum mengukur manfaat tambahan dibandingkan intervensi terpisah. Dalam kaitannya dengan SDGs, perubahan literasi anak, praktik usaha, dan ketertiban administrasi menunjukkan keselarasan arah dengan target 4.1, 8.3, dan 16.6. Evaluasi ini belum mengukur proporsi anak yang memenuhi kompetensi minimum menurut standar resmi, proporsi pekerjaan informal, ataupun kepuasan penduduk atas layanan publik; kepuasan peserta terhadap kegiatan juga tidak dapat menggantikan indikator layanan publik tersebut (United Nations, 2015).

Dari sisi refleksi, FGD akhir mengungkapkan harapan mitra agar kegiatan tidak berhenti setelah tim pengabdi meninggalkan lokasi. Pelaku UMKM meminta pendampingan lanjutan untuk legalitas usaha dan akses pembiayaan formal. Aparatur meminta pelatihan lanjutan tentang administrasi keuangan gampong. Orang tua meminta penambahan koleksi buku dan kegiatan di hari libur. Aspirasi tersebut menunjukkan tumbuhnya rasa memiliki, yang oleh Chambers (1994) dipandang sebagai indikator penting keberhasilan pendekatan partisipatif.

Persepsi dan Kepuasan Mitra

Selain skor tes, evaluasi akhir menggali persepsi mitra melalui kuesioner kepuasan dan wawancara. Sebanyak 81 dari 91 peserta (89,0%) menyatakan puas atau sangat puas terhadap pelaksanaan kegiatan, terutama karena materi mudah dipahami, fasilitator sabar, dan contoh yang dipakai berasal dari keseharian mereka. Analisis tematik terhadap catatan wawancara dan FGD memunculkan tiga tema utama, yaitu meningkatnya kepercayaan diri, tumbuhnya kebiasaan baru yang lebih tertib, dan keinginan untuk terus belajar bersama. Pelaku UMKM merasa lebih berani mengambil keputusan usaha karena memiliki angka yang dapat dijadikan dasar, sementara aparatur gampong merasa lebih percaya diri melayani warga karena memiliki prosedur yang jelas.

Temuan kualitatif ini memperkuat hasil kuantitatif sekaligus menjelaskan mekanisme perubahan. Peningkatan kepercayaan diri yang dilaporkan mitra konsisten dengan konsep pemberdayaan psikologis, yakni ketika seseorang merasa memiliki kendali dan kemampuan untuk memengaruhi lingkungannya (Zimmerman, 1995). Dengan kata lain, peningkatan skor pengetahuan tidak berdiri sendiri, tetapi diiringi perubahan sikap yang mendorong tindakan lanjutan. Namun, sebagian peserta, terutama pelaku usaha yang lebih tua, mengaku masih membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan pencatatan harian dan penggunaan ponsel untuk berjualan, sehingga pendampingan yang sabar dan bertahap tetap diperlukan agar perubahan tidak berhenti pada tingkat pengetahuan.

Rencana Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program dirancang melalui forum belajar bulanan UMKM, pengelolaan taman baca oleh unsur remaja, ibu-ibu, dan guru, serta penggunaan panduan administrasi sebagai bahan kerja dan serah terima aparatur. Naskah sumber menyebut penetapan pengelola melalui surat keputusan kepala gampong, tetapi belum menyertakan nomor, tanggal, nama gampong, dan salinan keputusan tersebut. Naskah juga belum memuat bukti Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk buku atau perangkat administrasi maupun dokumen komitmen alokasi Dana Gampong. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan lokal dibedakan dari kepastian dukungan legal dan pembiayaan yang masih perlu diverifikasi. Tindak lanjut diarahkan pada pengesahan pengelola, pencatatan serah terima aset, penetapan penanggung jawab, serta pembahasan kebutuhan biaya melalui mekanisme perencanaan gampong.

Keberlanjutan bertumpu pada kapasitas dan kepemilikan lokal, yang memerlukan pembagian tanggung jawab serta dukungan sumber daya setelah pendampingan (Narayan, 2002). Evaluasi lanjutan perlu memeriksa keterlaksanaan jadwal taman baca, konsistensi pencatatan usaha, penggunaan register, dan keberadaan dokumen kelembagaan. Durasi kegiatan yang singkat, penggunaan tes serta observasi jangka pendek, dan ketiadaan kelompok pembanding membatasi kesimpulan. Hasil yang tersedia menunjukkan perubahan awal peserta, sedangkan dampak terhadap pendapatan usaha, prestasi belajar anak, mutu layanan, dan keberlanjutan pembiayaan belum dapat dipastikan.

KESIMPULAN

Program pemberdayaan terpadu di Kecamatan Lhoksukon menunjukkan perubahan awal pada kapasitas dan praktik mitra melalui pencatatan usaha yang lebih tertib, pemanfaatan

pemasaran digital, penguatan minat baca anak, serta pembenahan administrasi gampong. Kontribusi utama program terletak pada hubungan antara pembelajaran peserta dan dukungan komunitas melalui kelompok usaha, taman baca, serta perangkat administrasi. Pendekatan partisipatif dan latihan berulang memberi ruang bagi mitra untuk menerapkan pengetahuan sesuai kebutuhan sehari-hari. Temuan tersebut mendukung arah pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kelembagaan, dengan batas pada hasil jangka pendek yang teramati selama pendampingan.

Pendampingan berikutnya perlu memprioritaskan konsistensi praktik, verifikasi legalitas usaha, penguatan dokumen pengelola taman baca, dan kepastian tanggung jawab pemeliharaan perangkat program. Pengukuran lanjutan perlu mencakup perubahan omzet dan penjualan, penggunaan taman baca, serta mutu layanan administrasi dengan instrumen dan periode pengamatan yang jelas. Desain evaluasi tanpa kelompok pembanding belum memungkinkan penarikan kesimpulan kausal atau pembuktian keunggulan program terpadu. Penerapan di lokasi lain perlu didahului asesmen kebutuhan dan penyesuaian sumber daya mitra.

Conflict of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

Declaration of Generative AI Usage

ChatGPT Pro 4.o was used solely for language editing and readability improvements. The authors retain full responsibility for the manuscript's content.

Author Contributions

FA (Lead & Corresponding Author): Conceptualization, project administration, and manuscript coordination.YGP, RA, NMS, K, RDC, SM, RK, M, N, AZ: Equal contribution to program execution, data collection, drafting, and manuscript review. All authors approved the final version.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Ayyagari, M., Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2007). Small and medium enterprises across the globe. *Small Business Economics*, *29*(4), 415–434. https://doi.org/10.1007/s11187-006-9002-5

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, *84*(2), 191–215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191

Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, *22*(7), 953–969. https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4

Cornwall, A., & Jewkes, R. (1995). What is participatory research? *Social Science & Medicine*, *41*(12), 1667–1676. https://doi.org/10.1016/0277-9536(95)00127-S

Cunningham, A. E., & Stanovich, K. E. (1997). Early reading acquisition and its relation to reading experience and ability 10 years later. *Developmental Psychology*, *33*(6), 934–945. https://doi.org/10.1037/0012-1649.33.6.934

Fernandes, D., Lynch, J. G., & Netemeyer, R. G. (2014). Financial literacy, financial education, and downstream financial behaviors. *Management Science*, *60*(8), 1861–1883. https://doi.org/10.1287/mnsc.2013.1849

Kaiser, T., & Menkhoff, L. (2017). Does financial education impact financial literacy and financial behavior, and if so, when? *The World Bank Economic Review*, *31*(3), 611–630. https://doi.org/10.1093/wber/lhx018

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, *52*(1), 5–44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

Lusardi, A., & Tufano, P. (2015). Debt literacy, financial experiences, and overindebtedness. *Journal of Pension Economics and Finance*, *14*(4), 332–368. https://doi.org/10.1017/S1474747215000232

Mol, S. E., & Bus, A. G. (2011). To read or not to read: A meta-analysis of print exposure from infancy to early adulthood. *Psychological Bulletin*, *137*(2), 267–296. https://doi.org/10.1037/a0021890

Narayan, D. (Ed.). (2002). *Empowerment and poverty reduction: A sourcebook*. World Bank.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. (2015).

Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American Journal of Community Psychology*, *23*(5), 569–579. https://doi.org/10.1007/BF02506982

Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, *44*(4), 652–667. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x

Sénéchal, M., & LeFevre, J.-A. (2002). Parental involvement in the development of children's reading skill: A five-year longitudinal study. *Child Development*, *73*(2), 445–460. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00417

Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, *9*, Article 18. https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008).

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. https://sdgs.un.org/2030agenda

Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance: Conceptual and actual challenges. *Third World Quarterly*, *21*(5), 795–814. https://doi.org/10.1080/713701075

Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. *American Journal of Community Psychology*, *23*(5), 581–599. https://doi.org/10.1007/BF02506983